



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI  
KEPUASAN MASYARAKAT**

**Periode Bulan Juli – Desember 2021**

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN  
MAKASSAR  
2021**

## **LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

Secara Umum sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum sepenuhnya merealisasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau (*Good Government*). Indonesia masih menghadapi hambatan dalam rendahnya kinerja pelayanan publik, lambatnya birokrasi dan masih tingginya angka korupsi. Pemerintah Indonesia masih mengalami banyak kendala dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Citra pelayanan publik pada sejumlah instansi pemerintahan yang terkesan kurang professional, tidak responsive dalam melayani dan tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan masih adanya pungutan liar oleh beberapa oknum seakan menjadi fenomena yang merakyat dalam cerminan birokrasi pemerintahan. Tingginya angka korupsi di Indonesia merupakan potret umum yang seakan mudah kita jumpai dalam sebuah instansi.

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta berbagai prinsip yang lain masih belum dipenuhi secara optimal, bahkan hanya terkesan sebagai wacana namun tanpa adanya realisasi yang maksimal (Brilianto, 2016). Indonesia masih perlu banyak berbenah, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah menuju penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, tepat, efisien, akuntabel dan professional sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan fungsinya sebagai pelayan publik. Sesuai dengan Perpres No. 81 tahun 2010 yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi secara visioner, taktis, menyeluruh, dan terukur untuk kurun waktu 2010-2025. Tiga sasaran utamanya, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah yang menerangkan bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi yang terfokus kepada pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu: perijinan dan tata niaga, keuangan Negara, dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM terdapat enam komponen diantaranya Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya. Pemerintah sebagai organ yang menjalankan fungsi eksekutif turut menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat, yang dapat terwujud dengan membangun aparatur negara melalui penerapan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja dari aparatur negara yang berimbas kepada kembalinya kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara.

Asas-asas inilah yang menjadi acuan dan dasar bagi setiap ASN dalam memberikan pelayanan publik. Kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan memberikan *simbiosis mutualisme* antara pemerintah dengan masyarakat. Komitmen pelayanan publik yang baik merupakan upaya untuk mempertahankan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berkualitas. Suatu institusi pemerintah atau organisasi publik harus melakukan pengukuran terhadap kualitas pelayanan yang telah disajikannya. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang tercermin dari Standar Kepuasan Masyarakat yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Persyaratan; adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian; adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif ; adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana; Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana; Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana; Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). (Permenpan RB., No. 14 Tahun 2017)

Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen kuesioner. Instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan dalam bentuk daftar pertanyaan secara tertulis terhadap responden yang dijawab secara tertulis. Kuesioner ini dibagi kepada responden dibuat dalam bentuk *rating scale* sesuai dengan skala pengukuran yang dipakai. Berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 menyebutkan bahwa desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas.

### **1. Ruang lingkup Pengukuran**

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Makassar pada Tahun 2021 Periode bulan Juli – Desember 2021 dengan menyebarkan angket/kuesioner kepada responden terhadap kualitas pelayanan kediklatan yang diberikan Balai Diklat Keagamaan Makassar.

### **2. Pengukuran Jawaban Responden**

Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Baik/Sesuai/Mudah/Cepat/Kompeten/Sopan dan Ramah, diberi nilai 4
2. Baik/Sesuai/Mudah/Cepat/Kompeten/Sopan dan Ramah, diberi nilai 3
3. Kurang Baik/Sesuai/Mudah/Cepat/Kompeten/Sopan dan Ramah, diberi nilai 2

4. Tidak Baik/Sesuai/Mudah/Cepat/Kompeten/Sopan dan Ramah, diberi nilai 1

### 3. Pengelolaan dan Analisis Data

Nilai Rata-rata Tertimbang IKM dihitung dengan menggunakan bobot nilai perunsur. Dalam perhitungan IKM terhadap 8 (delapan) unsur pelayanan, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{8} = 0,125$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: SKM Unit pelayanan x 25. Adapun interpretasi terhadap nilai yang diperoleh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 -64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Jumlah responden yang mengisi kuesioner pada periode Juli – Desember 2021 sebanyak 277 orang yang berasal dari ASN di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Makassar, baik yang berstatus PNS maupun non PNS. Hasil perhitungan jawaban responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2

## Pengolahan Data IKM terhadap Pelayanan Kediklatan di BDK Makassar

No	Keterangan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1	Jumlah Nilai/Unsur	959	949	926	929	958	979	945	935
2	Nilai Rata-rata	3,46	3,43	3,34	3,35	3,46	3,53	3,41	3,38
	Rata-rata	3,42							

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata nilai yang menjadi jawaban responden terhadap pelayanan kediklatan di Balai Diklat Keagamaan Makassar sebesar 3,42 atau nilai IKM sebesar 85,50. Nilai tersebut apabila melihat pada tabel tentang Nilai Persepsi, Interval IKM, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, nilai mutu pelayanan pada Balai Diklat Keagamaan Makassar berada pada kategori **Baik** atau Mutu Pelayanan **B**. (Pada Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30).

Sementara deskripsi dari setiap unsur dalam Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kediklatan di Balai Diklat Keagamaan Makassar pada Tahun 2021 periode Juli – Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pada Unsur 1 tentang “Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya?” mendapatkan nilai sebesar 3,46 atau IKM sebesar 86,50 atau berada pada kategori **Baik** atau Mutu Pelayanan **B**. Sebanyak 129 responden atau 46,57 persen menyatakan Sangat Sesuai, 147 responden atau 53,07 persen menyatakan Sesuai, dan 1 responden atau 0,36 persen menyatakan Kurang Sesuai dengan tidak ada responden yang menyatakan Tidak Sesuai. Kesesuaian persyaratan pada pelayanan dengan jenis pelayanan merupakan persyaratan administratif yang dibutuhkan oleh Balai Diklat Keagamaan Makassar dalam pembuatan pertanggungjawaban kegiatan kediklatan. Pelayanan yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Makassar pada peserta diklat telah menunjukkan hasil yang positif meskipun hal tersebut masih perlu ditingkatkan lagi.
2. Pada Unsur 2 tentang “Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan?” mendapatkan nilai sebesar 3,43 atau IKM sebesar 85,75

atau berada pada kategori **Baik** atau Mutu Pelayanan **B**. Sebanyak 126 responden atau 45,49 persen menyatakan Sangat Mudah, 143 responden atau 51,62 persen menyatakan Mudah, 8 responden atau 2,89 persen menyatakan Kurang Mudah, dan tidak ada responden yang menyatakan Tidak Mudah. Kemudahan pelayanan merupakan salah satu syarat utama dalam menciptakan pelayanan prima. Prinsip kesederhanaan dalam memberikan pelayanan akan berimplikasi pada kemudahan pelayanan. Pada unsur ini Sebagian besar responden yakni 51,62 persen menyatakan mudah. Hal ini hendaknya dapat ditingkatkan lagi persentasinya sehingga stakeholder merasa pelayanan di Balai Diklat Keagamaan Makassar menjadi sangat mudah yang tentunya tidak melanggar prinsip dan aturan pelayanan yang baik dan tepat.

3. Pada Unsur 3 tentang “Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?” mendapatkan nilai sebesar 3,34 atau IKM sebesar 83,50 atau berada pada kategori **Baik** atau Mutu Pelayanan **B**. Sebanyak 101 responden atau 36,46 persen menyatakan Sangat Cepat, 170 responden atau 61,37 persen menyatakan Cepat, 6 responden atau 2,17 persen menyatakan Kurang Cepat, dan tidak ada responden yang menyatakan Tidak Cepat.
4. Pada Unsur 4 tentang “Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan?” mendapatkan nilai sebesar 3,35 atau IKM sebesar 83,75 atau berada pada kategori **Baik** atau Mutu Pelayanan **B**. Sebanyak 102 responden atau 36,82 persen menyatakan Sangat Sesuai, 171 responden atau 61,82 persen menyatakan Sesuai, 4 responden atau 1,44 persen menyatakan Kurang Sesuai, dan tidak ada responden yang menyatakan Tidak Sesuai. Kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan merupakan salah satu unsur Survey Kepuasan Masyarakat yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yang menyatakan bahwa hasil pelayanan diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada unsur ini, jawaban responden sebagian besarnya (61,82 persen) menunjukkan Baik. Hal ini



tentunya harus ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya kepada stakeholder sehingga persentasi pada jawaban Sangat Baik menjadi lebih tinggi lagi.

5. Pada Unsur 5 tentang “Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?” mendapatkan nilai sebesar 3,46 atau IKM sebesar 86,50 atau berada pada kategori **Baik** atau Mutu Pelayanan **B**. Sebanyak 127 responden atau 45,85 persen menyatakan Sangat Kompeten, 150 responden atau 54,15 persen menyatakan Kompeten, dan tidak ada responden yang menyatakan Kurang Kompeten dan Tidak Kompeten. Unsur Survey Kepuasan Masyarakat ini termasuk pada aspek Kompetensi Pelaksana yang merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Pelaksana pelayanan kediklatan dalam ini adalah mulai dari PIC (*Person in Charge*) di Kantor Kementerian Agama di tingkat wilayah dan kabupaten/Kota, panitia diklat dan widyaiswara. Pada unsur ini menunjukkan 54,15 persen yang menjawab Kompeten. Meskipun hasilnya sudah berada pada kategori positif tetapi masih harus ditingkatkan lagi menjadi Sangat Kompeten. Peningkatan kompetensi petugas dalam pelayanan kediklatan hendaknya dapat ditingkatkan lagi, baik secara mandiri dari kesadaran petugas diklat itu sendiri maupun secara kelembagaan dengan mengikutkan pada kegiatan pelatihan atau Balai Diklat Keagamaan Makassar membuat kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi petugas kediklatan, baik yang petugas terkait kerja-kerja administrasi maupun yang terkait dengan proses pembelajaran.
6. Pada Unsur 6 tentang “Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan?” mendapatkan nilai sebesar 3,53 atau IKM sebesar 88,25 atau berada pada kategori **Baik** atau Mutu Pelayanan **B**. Sebanyak 148 responden atau 53,43 persen menyatakan Sangat Sopan dan Ramah, 129 responden atau 46,57 persen menyatakan Sopan dan Ramah, dan tidak ada responden yang menyatakan Kurang Sopan dan Ramah serta Tidak Sopan dan Ramah. Pada unsur ini, menunjukkan bahwa sebagian besar responden yakni sebanyak 53,43 persen menyatakan bahwa perilaku petugas dalam pelayanan kediklatan Sangat Sopan dan Ramah. Ini adalah nilai

positif yang harus dipertahankan bahkan kalau bisa harus ditingkatkan lagi persentasinya.

7. Pada Unsur 7 tentang “Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan?” mendapatkan nilai sebesar 3,41 atau IKM sebesar 85,25 atau berada pada kategori **Baik** atau Mutu Pelayanan **B**. Sebanyak 116 responden atau 41,88 persen menyatakan Sangat Baik, 159 responden atau 57,40 persen menyatakan Baik, 2 responden atau 0,72 persen menyatakan Kurang Sesuai, dan tidak ada responden yang menyatakan Tidak Sesuai. Pertanyaan pada kuesioner ini merupakan salah unsur Survey Kepuasan Masyarakat pada aspek Sarana dan Prasarana yang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dan merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Meskipun sebagian besar responden menjawab secara positif (Sangat Sesuai dan Sesuai), tetapi masih ada 0,72 persen menyatakan Kurang Sesuai. Ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari Balai Diklat Keagamaan Makassar untuk mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan sarana dan prasarana kegiatan kediklatan.
8. Pada Unsur 8 tentang “Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan?” mendapatkan nilai sebesar 3,38 atau IKM sebesar 84,50 atau berada pada kategori **Baik** atau Mutu Pelayanan **B**. Sebanyak 105 responden atau 37,91 persen menyatakan Sangat Baik, 171 responden atau 61,73 persen menyatakan Baik, 1 responden atau 0,36 persen menyatakan Kurang Baik, dan tidak ada responden yang menyatakan Tidak Baik. Unsur ini merupakan salah satu unsur dalam Survey Kepuasan Masyarakat unsur Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan yang merupakan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Pada unsur ini sebagian besar responden yakni sebesar 61,73 persen menyatakan Baik. Ini merupakan tantangan bagi pihak Balai Diklat Keagamaan Makassar untuk membuat sistem dan prosedur pelayanan yang lebih mudah dan sederhana yang memudahkan stakeholder memberikan masukan dan keluhan terkait pelayanan kediklatan.

Yang terpenting adalah kecepatan merespon dengan tindakan yang sifatnya solutif sehingga kejadian yang dikeluhkan oleh stakeholder tidak terulang lagi.

Dari 8 (delapan) unsur Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kediklatan di Balai Diklat Keagamaan Makassar menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah positif yang berada pada nilai sebesar 3,42 atau nilai IKM sebesar 85,50 sehingga berada pada kategori **Baik** atau Mutu Pelayanan **B**.

Demikian laporan ini kami sampaikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Desember 2021.

Kepala,  
  
**Juhrah**

**PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA  
PELAYANAN KEDIKLATAN DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN  
MAKASSAR PERIODE JULI – DESEMBER 2021**

No Responden	Jenis Kelamin	Domisili	Penddkan	Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	3	3	4	3	3
2	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	3	3	4	3	3
3	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	2	3	3	3	3	3
4	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Non PNS	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
8	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	4	4	4	4
9	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	2	3	4	4	4
11	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
12	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
13	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	2	4	4	4	3	3
14	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
18	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	4	4	4	4	4	4	4
19	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	4	4	3	3
20	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
21	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	3	4	3	3	3	4	3
22	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Guru	4	3	3	3	4	3	3	3
23	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	3	3	4	4	4	3
24	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Penyuluh	3	3	3	3	4	4	4	4
25	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	3	2	3
26	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
27	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	2	3	3	3	3	3	4
28	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Pegawai	3	4	3	3	3	4	3	3
29	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	3	4	3	3	3	4	3	3
30	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4
31	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4

32	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
33	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
34	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	3	3	3	4	4
35	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	3	3	3
36	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Penyuluh	3	3	3	3	3	4	3	3
37	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
38	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pengawas	4	3	3	3	4	4	3	4
39	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	3	4	3	3	3	3	4
40	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	4	3	3	3	3
41	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Guru	3	3	3	3	3	4	3	3
42	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	4	4	4	3	3
43	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	4	4	4	3	3
44	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pengawas	4	3	3	3	4	4	3	4
45	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Pegawai	3	3	4	3	4	3	3	3
46	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	4	4	4	4	4
47	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	4	4	3	4	3	3	3
48	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	4	3	4	4	3	3
49	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	4	3	3	3	3
50	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	4	3	3	3	3	3	3
51	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	2	3	3	3	4	4	4
52	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	3	3	4	4	4	4	3	4
53	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
54	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
55	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Kepala Ma	4	3	4	3	3	3	4	4
56	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Kepala Ma	4	3	4	3	3	3	4	3
57	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S1	Penyuluh	3	3	2	2	3	4	3	3
58	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
59	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	4	3	3	4	3	4	3
60	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	4	4	3	3	4	3	3
61	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	4	3	4	4	3	3
62	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
63	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
64	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
65	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S1	Pegawai	3	4	3	3	4	4	3	4
66	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
67	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	4	3

68	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
69	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
70	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Pengawas	4	4	4	4	4	4	4	4
71	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Pengawas	4	4	4	4	4	4	4	4
72	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S2	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
73	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S2	Guru	4	3	3	3	3	3	3	3
74	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Penghulu	4	4	3	4	4	4	4	3
75	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	3	4	3	3	3
76	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	3	4	3	3	3
77	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	2	3	3	3	3	3	3
78	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
79	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	4	4	4	4	4	4
80	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4
81	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4
82	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
83	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
84	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
85	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
86	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
87	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	4	4	3	3	3	3
88	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	3	3	4	3	3
89	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	3	3	4	3	4
90	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
91	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
92	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	3	3	4	3	4	3
93	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S1	Penghulu	3	3	3	3	3	4	3	3
94	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	4	4	3	3
95	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	4	4	3	3
96	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Pegawai	2	3	2	3	3	3	3	3
97	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Pegawai	4	4	4	4	4	3	4	3
98	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Pegawai	4	4	4	4	4	3	4	4
99	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	3	4	4	3	4
100	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
101	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
102	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	3	4	3	3	3
103	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3

104	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Pegawai	4	4	4	4	4	4	3	4
105	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Pegawai	4	4	4	4	4	4	3	4
106	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Guru	4	3	4	4	4	4	4	3
107	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	4	3	3	4	4	4	3
108	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	4	3	4	4	4	4	3
109	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
110	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
111	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
112	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
113	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	4	3	3	3	4	4	4	4
114	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	4	4	3	4	4	4	4	4
115	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	4	3
116	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	4	3
117	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Penghulu	3	3	3	3	3	3	3	3
118	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Guru	4	3	3	3	4	4	4	3
119	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Non PNS	3	3	3	3	3	4	3	3
120	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Pegawai	3	4	3	3	3	3	3	3
121	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Pegawai	3	4	3	3	3	3	3	3
122	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Guru	3	2	3	2	3	3	3	3
123	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Guru	3	2	3	3	3	3	3	3
124	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	4	3	3	4	3	3	3
125	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	4	3	3	4	4	3
126	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	4	3	4	4	4	3
127	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	3	3	4	3	3	3	3
128	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4
129	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4
130	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
131	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	3	4	4	3	4
132	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S3	Pegawai	3	3	3	4	3	3	4	3
133	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S3	Pegawai	4	3	3	2	3	3	3	3
134	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	4	3	3	4	4	3	4
135	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	3	3	3	3	4
136	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
137	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
138	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
139	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S2	Guru	4	3	3	3	3	3	3	3

140	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
141	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
142	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Penyuluh	3	3	2	3	3	3	3	3
143	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
144	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
145	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	4	3	3	3
146	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	4	4	3
147	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
148	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	4	3	3	3	4	4	4
149	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	3	3	4	3	4	4	4
150	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Pegawai	4	3	3	3	3	3	4	3
151	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	4	3	3	3	3	4	3	3
152	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	3	3	4	3	3
153	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S1	Pegawai	3	3	3	4	4	4	3	3
154	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S1	Pegawai	3	3	3	4	4	4	3	3
155	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Pengawas	4	4	4	4	4	4	4	4
156	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Pengawas	4	4	4	4	4	4	4	4
157	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S1	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
158	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S1	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
159	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S2	Pegawai	3	4	3	3	3	3	4	3
160	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S2	Pegawai	3	4	3	3	3	3	4	3
161	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Kepala Ma	3	3	3	3	3	4	3	3
162	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Kepala Ma	3	3	3	3	3	3	3	3
163	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S2	Pengawas	4	3	3	3	3	4	4	3
164	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	4	3	3	3
165	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	4	3	3	3	3	3	3
166	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
167	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	3	3	3	3	3	3	3
168	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4
169	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4
170	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4
171	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Penghulu	4	4	4	4	4	4	4	4
172	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Penghulu	4	4	4	4	4	4	4	4
173	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pengawas	4	4	4	3	4	4	3	4
174	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pengawas	4	4	4	4	3	4	4	4
175	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pengawas	4	4	4	4	4	4	4	4



176	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pengawas	4	4	4	4	4	4	3	4
177	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S2	Pengawas	4	4	3	3	3	3	4	3
178	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S2	Pengawas	4	4	3	3	3	3	3	3
179	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pengawas	4	4	4	3	3	4	4	3
180	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	4	4	3	3	3	4	4
181	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Penyuluh	3	3	3	3	3	3	3	3
182	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Penyuluh	3	3	3	3	3	3	3	3
183	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Guru	4	4	3	3	3	4	3	3
184	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Guru	3	3	4	3	3	4	4	4
185	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
186	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
187	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Guru	4	4	3	3	4	3	4	3
188	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	3	3	3	3	3	3	3
189	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Pegawai	3	3	3	3	3	4	4	3
190	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
191	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	4, 3
192	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pengawas	3	3	3	3	3	3	3	3
193	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	2	3	3	3	3	3	3
194	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
195	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
196	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
197	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Non PNS	3	3	3	3	3	3	3	3
198	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Non PNS	3	3	3	3	3	3	3	3
199	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
200	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
201	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Penghulu	3	4	4	4	4	4	4	4
202	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4
203	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S1	Pegawai	3	2	3	3	3	3	2	2
204	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
205	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
206	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	3	3	4	3	3
207	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	3	3	4	3	3
208	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	3	3	4	3	3
209	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
210	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
211	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S1	Guru	3	2	3	3	3	3	3	3

212	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	4	4	4	4	3
213	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
214	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
215	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
216	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
217	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
218	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	3	3	3	3	3	3	3
219	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	3	3	3	3	3
220	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	3	3	4	3	4	4	3
221	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
222	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
223	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
224	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	3	4
225	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	3	4
226	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
227	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
228	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	3	3	3	4	4	4	3
229	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
230	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Guru	4	4	4	4	3	4	3	3
231	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	3	3	3	3	4	4	3
232	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
233	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
234	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
235	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	3	4	3	3	4	4	3	4
236	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	4	3	4	4	4	4	4
237	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	4	3	4	4	4	4	3	4
238	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	4	3	4	4	4	4	4	4
239	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Non PNS	4	4	4	4	4	4	3	4
240	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	4	3	4	4	4	4
241	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	4	3	4	4	4	4	4
242	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	3	4	3	4	4	3
243	Laki-Laki	Sulawesi Barat	S1	Guru	4	4	3	3	3	3	3	3
244	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	4	3	3	3	3	3
245	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	4	3	3	3	3	3
246	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	4	3	4	4	4
247	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	3	4	4	4	4	4	4	4

248	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	3	4	4	4	4	4	4	4
249	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Non PNS	3	3	3	3	4	3	3	3
250	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Non PNS	3	3	3	3	4	3	3	3
251	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Non PNS	3	3	3	3	3	3	3	3
252	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
253	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Kepala Ma	3	3	3	3	3	3	3	3
254	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
255	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Kepala Ma	3	3	2	3	3	3	3	3
256	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	4	3	3
257	Perempuan	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
258	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
259	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
260	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pengawas	3	3	3	3	3	4	3	3
261	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pengawas	3	3	3	3	3	3	3	3
262	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
263	Laki-Laki	Sulawesi Tenggara	S2	Pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3
264	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	3	3	3	4	4	4	3
265	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pengawas	3	4	3	3	4	4	3	4
266	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
267	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	3	3	3	3	3	3
268	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
269	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
270	Perempuan	Sulawesi Tenggara	S1	Guru	4	4	4	4	4	4	4	4
271	Perempuan	Sulawesi Barat	S1	Guru	3	4	3	3	3	3	3	3
272	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	4	4	3	3	3	3
273	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S1	Guru	3	3	4	4	3	3	3	3
274	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	4	4	4	3	4
275	Perempuan	Sulawesi Selatan	S1	Guru	4	4	3	4	4	4	4	3
276	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	3	3	3	4	4	4
277	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	S2	Pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah Nilai/Unsur					959	949	926	929	958	979	945	932
Nilai Rata-rata					3.46	3.4	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4